

REDAKSI JURNAL STRATEGI DAN BISNIS

Penanggung Jawab

Didik Eko Julianto

Redaktur

Zarah Puspitaningtyas

Penyunting

Djoko Poernomo

Redaktur Pelaksana

Edy Wahyudi

Sasongko

Akhmad Toha

Suhartono

Hari Karyadi

Yeni Puspita

Desain Grafis

Chandra Eko Wahyudi Utomo

Anggota

Indaryani

Edi Suryanto

Taufan Wahyudi

Mitra Bestari

Sam'un Jaja Rahardja (Universitas Padjadjaran, Bandung)

Martani Huseini (Universitas Indonesia, Jakarta)

Togar M. Simatupang (Institut Teknologi Bandung, Bandung)

Fitri Abdillah (STP Tri Sakti, Jakarta)

Poerwanto (Praktisi Komunikasi Bisnis)

Diterbitkan Oleh

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Anggota Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia (AIABI)

Alamat Redaksi

Ruang Redaksi Strategi & Bisnis Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37 Jember 68121

Telp./Fax. 0331 – 335586

Surel: jurnal.adbis@unej.ac.id

Laman: <http://www.adbis.fisip.unej.ac.id>

Salam Redaksi

Tren strategi bisnis di Indonesia tahun 2019 ini mulai menunjukkan peningkatan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu tren yang menonjol adalah penggunaan visual search. *Start-up* bisnis *online* semakin berkembang sebut saja shopee, tokopedia, buka lapak dan sebagainya. Tentu hal ini seiring dengan peningkatan peran media sosial sebagai media komunikasi produsen, pedagang dan pembeli secara online. Pada jurnal Volume 7 Nomor 1 edisi April 2019 mengupas tentang ekonomi mikro dan memaparkan masalah strategi penanganan bencana yang menjadi peristiwa rutin di berbagai daerah Indonesia. Tulisan Margono dan kawan-kawan mengupas hubungan simultan nilai tukar riil GDP Amerika Serikat dan Neraca Perdagangan Indonesia dalam 2 dasawarsa terakhir. Edisi kali ini banyak mengkaji ekonomi mikro baik lokal, regional maupun nasional. Tak kalah menarik dalam edisi kali ini adalah tulisan Wulandari dan kawan-kawan yang membahas strategi pemasaran UMKM pada sosial media. Permasalahan kebencanaan menjadi bagian penting untuk dikaji dalam jurnal ini mengingat dapat mempengaruhi sektor bisnis di Indonesia. Tulisan Agus dan Chandra membahas mengenai pengelolaan bencana di Kabupaten Jember dan ternyata peran sumber daya manusia dalam penanganan bencana sangatlah menarik. Menjamurnya tenaga relawan bencana di kabupaten Jember baik kelompok maupun organisasi menjadi tantangan tersendiri untuk saling sinergi dalam penanganan bencana. Di bagian akhir, Rofiqoh dan kawan-kawan memaparkan pengaruh citra merek terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk. Citra merek yang baik akan memberi dampak positif bagi konsumen untuk semakin yakin dalam pembelian produk.

Semoga pembaca dapat menyerap artikel-artikel penting pada edisi ini dan tentunya dapat berguna dalam pengembangan strategi kebijakan dan pengalaman bisnis. Dewan redaksi mengucapkan selamat membaca!

Redaksi

April 2019

DAFTAR ISI

Analisis Hubungan Simultan Nilai Tukar Riil, GDP Amerika Serikat dan Neraca Perdagangan Indonesia Periode 1995:Q1-2015:Q4 Erik Stefano Margono, Hj. Made Siti Sundari, Hj. Mintarti Arian	1
Analisis Preferensi Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pos pada PT Pos Indonesia di Jember Cicilia Permataning, Didik Eko Julianto, Sri Wahjuni	24
UMKM <i>Go Social Media Marketing</i> pada UD. AYS Gresik dan UMKM Sendy Leather Sidoarjo Sri Hariani Eko Wulandari, Ayouvi Poerna Wardhanie, Erwin Sutomo	42
Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Agus Suharsono, Chandra Eko Wahyudi Utomo	54
Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Dividend Policy</i> dan <i>Firm Value</i> (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2015) Nur Ajizah, Nur Rohmat Nuzil	68
Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Produk Fungsida Merek Antracol Konsumen di Kecamatan Wuluhan Siti Rofiqoh, Didik Eko Julianto, Sasongko	90

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Agus Suharsono¹, Chandra Eko Wahyudi Utomo²
suharsono.fisip@unej.ac.id¹

Abstract

Disaster management can have a bad impact if it is wrong in its management and actually worsens the conditions in the disaster area. The government is obliged to organize and develop a clear concept of how to handle disasters in a disaster affected area. The government as the holder of regional authority plays an important role in the distribution of human resources who contribute to the handling of natural disasters in a particular area. For this reason, the establishment of a National Disaster Management Agency that is structured from the center to the districts and the National SAR Agency seems to be a solution to disaster management and handling in Indonesia. However, along with the development of human civilization it turned out that there were also various institutions / organizations or just volunteer forums standing to help with these humanitarian tasks. The existence of this volunteer organization should be regulated and controlled so that when a disaster strikes, it does not even disrupt the process of handling disasters or complicating the situation in the disaster area. In general there are 2 important elements, namely the Government through BASARNAS, BPBN / BPBD, Dinsos (PMI and Tagana) and through community participation (individual / group volunteers). It is time for management of human resources in handling natural disasters to be regulated and socialized to the community, especially in disaster-prone areas. Standard Operating Procedures already exist and need to be disseminated to the public as much as possible, especially in disaster-prone areas in Jember Regency.

Keywords: *Management, Human Resources, Floods and Landslides*

Abstrak

Penanganan kebencanaan membutuhkan konsep pemikiran yang sistematis dan terpadu. Penanggulangan bencana dapat berakibat buruk jika salah dalam pengelolaannya dan justru semakin memperparah kondisi di daerah bencana. Pemerintah berkewajiban menata dan mengembangkan konsep yang jelas bagaimana penanganan bencana pada suatu daerah terdampak bencana. Pemerintah sebagai pemegang otoritas wilayah memegang peranan penting dalam distribusi sumber daya manusia yang ikut andil saat penanganan bencana alam di suatu daerah tertentu. Untuk itu, dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang terstruktur dari pusat hingga kabupaten dan Badan SAR Nasional seakan menjadi solusi atas pengelolaan dan penanganan bencana di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia ternyata juga bermunculan berbagai lembaga/organisasi atau sekedar forum relawan berdiri untuk membantu tugas-tugas kemanusiaan tersebut. Keberadaan organisasi relawan ini patut untuk diatur dan

¹ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

² Anggota Tagana Kabupaten Jember

dikendalikan agar saat terjadi bencana justru tidak malah mengganggu proses penanganan bencana atau memperumit keadaan di daerah bencana. Secara umum terdapat 2 elemen penting, yaitu Pemerintah melalui BASARNAS, BPBN/BPBD, Dinsos (PMI dan Tagana) dan melalui partisipasi masyarakat (relawan perseorangan/kelompok). Sudah saatnya pengelolaan sumber daya manusia dalam penanganan bencana alam diatur dan disosialisasikan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah rawan bencana. Standar Operasional Prosedur sudah ada dan perlu disebarluaskan semaksimal mungkin kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana di Kabupaten Jember.

Kata kunci: Pengelolaan, Sumber Daya Manusia, Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Pendahuluan

Letak geografis Indonesia yang sarat akan keindahan alamnya dengan rasa khas khatulistiwa, ternyata juga memiliki potensi bencana yang sangat besar. Indonesia dilalui jalur Cincin Api (*Ring of Fire*) sehingga memungkinkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang masih aktif yang memungkinkan akan meletus secara tiba-tiba. Juga Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rawan gempa, selain Jepang, India, bahkan Filipina. Ini dikarenakan posisi Indonesia bersebelahan dengan Samudera Hindia dan Pasifik, posisi geologis Indonesia pada pertemuan tiga lempeng utama dunia (lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik). Dan kondisi permukaan wilayah Indonesia (relief) yang sangat beragam. Dengan kondisi seperti tersebut diatas, Indonesia rawan terjadi bencana dan bencana yang sering terjadi adalah gunung meletus, bencana tsunami, banjir bandang dan tanah longsor. Secara umum, pemahaman karakteristik bencana merupakan aspek fundamental dalam upaya penanggulangan bencana. Karakteristik bencana yang mengancam sebagian besar wilayah tanah air perlu dipahami dengan baik,

karena salah satu penyebab timbulnya kerugian dan penderitaan yang cukup berat adalah kurangnya pemahaman terhadap karakteristik ancaman bencana, sehingga masyarakat kurang siap menghadapinya. Tulisan ini mengupas tentang bencana alam terutama bencana banjir dan tanah longsor karena itu sering terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman terdapat Perubahan paradigma Kebencanaan. Diterbitkannya Undang – Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 membuktikan bahwa paradigma penanggulangan bencana semakin lama semakin berkembang dari melakukan reaksi tanggap darurat pada saat setelah terjadi bencana menuju antisipasi pengurangan kerugian baik harta maupun nyawa sebelum terjadi bencana. Masyarakat baru merasakan dampak setelah terjadi suatu bencana seperti kehilangan tempat tinggal, kehilangan hewan ternak dan rusaknya lahan. Bahkan dampak yang paling menyedihkan adalah hilangnya nyawa manusia. Atas dasar dampak yang sangat merugikan tersebut, masyarakat akhirnya sadar bahwa perlunya pengurangan kerugian baik harta maupun nyawa dengan cara melakukan

antisipasi dan pengurangan tingkat potensi bencana. Pemerintah pun merespon dengan menerbitkan Undang-Undang tentang Kebencanaan.

Respon masyarakat dalam penanganan bencana sangat besar. Terbukti hampir di setiap terjadi bencana, dalam hitungan waktu apalagi di era milenial ini daerah yang tertimpa bencana menyebar dengan sangat cepat. Fakta di lapangan adanya puluhan organisasi dan kelompok-kelompok relawan sebagai sumberdaya yang turut andil secara aktif dalam pengelolaan bencana. Namun, tidak sedikit yang sering turun tanpa koordinasi dengan pihak penyelenggara penanggulangan bencana. Akibatnya, penanganan bencana terkesan tidak terkelola dengan baik, bahkan terkadang justru menjadi lamban. Padahal seyogyanya penanganan bencana dapat dilakukan oleh pihak yang tepat dengan pembagian sumberdaya secara tepat pula. Untuk itulah, tulisan ini menjelaskan situasi dan memberikan solusi tentang apa dan bagaimana penanganan bencana yang melibatkan berbagai sumberdaya yang ada di sekitar daerah bencana.

Batasan Masalah

Tulisan ini lebih menekankan pada kajian literasi dalam aspek kajian sumber daya manusia sebagai operator atau pelaku utama penanganan bencana alam terutama bencana banjir dan tanah longsor yang seringkali terjadi di Kabupaten Jember. Sebagian besar isi tulisan ini merupakan pengalaman-pengalaman kegiatan Taruna Siaga Bencana di kabupaten Jember.

Tujuan

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menyajikan ulasan yang menjelaskan pentingnya pengelolaan sumberdaya dalam penanggulangan bencana. Sehingga ketika bencana terjadi, ada garis koordinasi yang jelas dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Jember. di samping itu, berbagai pihak dapat memahami pentingnya pembagian kerja dalam penanggulangan bencana sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki masing-masing potensi yang ada.

Manfaat

Manfaat yang dapat dipetik adalah adanya kelancaran dalam proses penanganan bencana dan lebih tepat sasaran serta lebih fokus dalam proses penanganan bencana.

Tinjauan Pustaka

Definisi Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola dan bersinonim dengan kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Usman (2004:3): *Management* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus.

Pengertian Bencana

Bencana (*disaster*) menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Beberapa definisi dan pengertian bencana dari beberapa organisasi penanggulangan bencana, yaitu:

- Bencana didefinisikan oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana (UNISDR) sebagai gangguan serius terhadap fungsi komunitas atau masyarakat yang melibatkan manusia luas, kerugian materi, ekonomi atau lingkungan dan dampak, yang melebihi kemampuan yang terkena dampak komunitas atau masyarakat untuk mengatasi penggunaan sumber dayanya sendiri (*World Confederation for Physical Therapy*, 2016).
- Menurut *Asian Disaster Reduction Center*, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada (Wijayanto, 2012).
- Menurut BAKORNAS PBP, bencana adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan, serta melampaui kemampuan dan sumberdaya masyarakat untuk menanggulangnya.
- Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan

ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Jenis-Jenis Bencana

Bencana (menurut UU Nomor 24 Tahun 2007) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. **Bencana non alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi dan wabah penyakit.
3. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
4. **Kegagalan Teknologi** adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoprasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

Sedangkan menurut (Amhar dan Darmawan, 2007), terdapat tiga jenis bencana berdasarkan penyebabnya, yaitu sebagai berikut:

a. Bencana Geologis

Bencana geologis terdiri dari:

1. **Earthquake (gempa bumi)**, yaitu peristiwa pelepasan energi yang

menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Waktu terjadinya gempa bumi tidak bisa diprediksi.

2. **Tsunami**, disebabkan oleh gempabumi di laut dalam kondisi tertentu, selain dapat juga oleh letusan gunung api bawah laut atau jatuhnya asteroid besar ke dalam laut. Kapan tsunami akan menghantam daratan dapat diprediksi sehingga dapat dibuat *Early Warning System* meskipun waktu yang tersisa hanya berkisar 5-20 menit.
3. **Volcano**, yaitu aktivitas vulkanik (gunung api) yang waktu kejadiannya dapat diprediksi dengan baik karena aktivitas gunung api yang selalu dipantau.
4. **Landslide (longsor)**, waktu kejadiannya tidak bisa diprediksi namun tanda-tanda tanah yang akan longsor biasanya dapat dideteksi.

b. Bencana Meteorologis

Semua bencana meteorologis saat ini termasuk fenomena alam yang dapat diprediksi cukup baik setelah ada sistem pemantauan yang terpadu dengan stasiun pemantau dan satelit cuaca. Bencana meteorologis juga selalu memiliki interaksi dengan aktivitas manusia (lahan hijau/ lahan resapan air, drainase, pintu air, pompa). Bencana Meteorologis terdiri dari:

1. **Flood (banjir)**, yaitu peristiwa ketika debit air (air yang masuk ke suatu tempat dari curah hujan, limpahan atau run-up pasang laut) lebih besar dari kredit air (air yang keluar dari tempat tersebut baik karena meresap ke dalam tanah, diupkan maupun dibuang ke tempat lain).
2. **Wave (gelombang laut)**, yang dapat menyebabkan abrasi.

3. **Wildfire (kebakaran liar)**, sebagian dapat disebabkan faktor manusia (pembukaan lahan), namun kebakaran yang meluas hanya dimungkinkan oleh kondisi hutan atau belukar yang kering.
4. **Drought (kekeringan)**, yang umumnya diikuti oleh gagal panen.
5. **Storm (topan)**.

c. Bencana Anthropogenis

Bencana anthropogenis adalah bencana yang secara langsung muncul karena kesalahan, kesengajaan atau kelalaian manusia yang berakibat luas pada lingkungan. Bencana anthropogenis misalnya kerusakan industri (contoh kerusakan pabrik kimia di Bhopal atau ledakan PLTN di Chernobyl) atau kecelakaan transportasi (misalnya kebocoran tanker Exxon Valdez di Alaska). Bencana anthropogenis lain yang dapat terjadi misalnya terorisme, sabotase, kerusuhan dan konflik sosial.

Manajemen Bencana

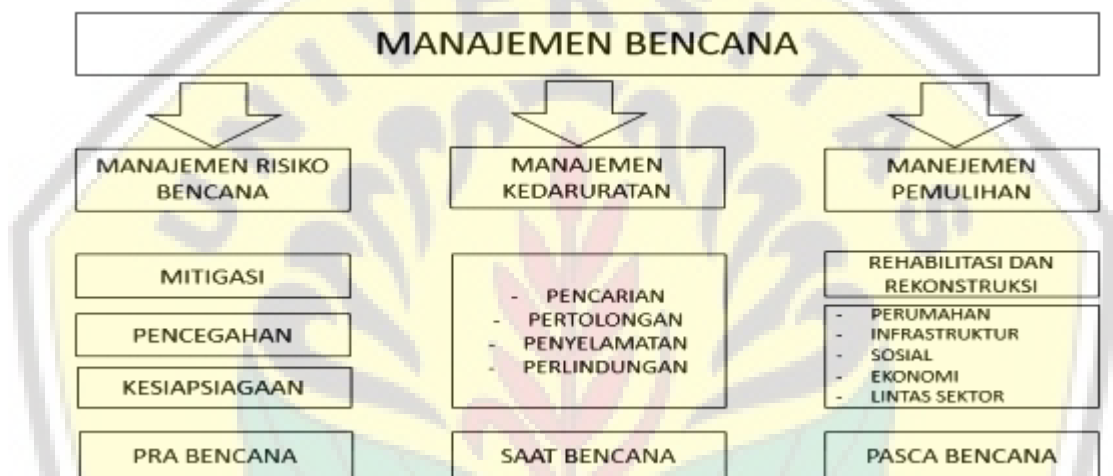
Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
2. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban.
3. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke

- daerah baru yang layak huni dan aman.
4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.
 5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.
 6. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Manajemen bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Adapun jenis dan penjelasannya sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1. Manajemen Bencana

a. Tahap Pra Bencana

Terdapat beberapa tahap dalam kegiatan pra bencana. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain:

1. **Pencegahan (prevention).** Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Misalnya melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu di daerah yang curam, dan melarang membuang sampah sembarangan.
2. **Mitigasi Bencana (Mitigation).** Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan

menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui: a) pelaksanaan penataan ruang, b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

3. **Kesiapsiagaan (Preparedness).** Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
4. **Peringatan Dini (Early Warning).** Peringatan Dini adalah

serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat (*accessible*), segera (*immediate*), tegas tidak membingungkan (*coherent*), bersifat resmi (*official*).

b. Tahap Saat Terjadi Bencana

Tahap-tahap kegiatan saat terjadi bencana adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. **Tanggap Darurat (*response*).** Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain: a) pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; b) penentuan status keadaan darurat bencana; c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d) pemenuhan kebutuhan dasar; e) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
2. **Bantuan Darurat (*relief*).** Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

dasar berupa: Pangan, Sandang, Tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

c. Tahap Pasca Bencana

1. **Pemulihan (*recovery*).** Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
2. **Rehabilitasi (*rehabilitation*).** Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
3. **Rekonstruksi (*reconstruction*).** Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana

Pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana secara global/internasional yaitu timbulnya “Kesadaran” akan upaya peredaman atau pengurangan bencana yang dimulai pada tahun 1990. Selanjutnya pada bulan Mei 1994 dikaji di Yokohama yang menghasilkan Strategi dan Rencana Aksi pada tanggal 30 Juli 1999. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan Resolusi No. 63 Tahun 1999 tentang Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional (1990-1999). Lebih lanjut menurut Rozy dalam www.scribd.com/doc/50639641/Belajar-Manajemen-Bencana-Jepang, PBB memfokuskan tindakan kepada pelaksanaan Strategi Internasional untuk pengurangan risiko bencana (*International Strategy for Disaster Reduction - ISDR*), kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan konferensi sedunia hingga lahirnya Kerangka Aksi Hyogo untuk Pengurangan Risiko Bencana.

Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia

Kebijakan penanggulangan bencana diterjemahkan dalam Sistem Nasional Penanggulangan Bencana (SisNas PB), dimana sistem dan sub-sistem ini telah dan terus dikembangkan dengan komponen sebagai berikut:

1. Legislasi

a. Nasional:

UU PB no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008

tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala (Perka) BNPB dan lain sebagainya.

b. Daerah:

Peraturan daerah atau Qanun terkait penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau kepala daerah di level provinsi dan kabupaten. Adapun contohnya seperti Qanun Nomor 5 tentang Penanggulangan Bencana Aceh dan lain sebagainya.

2. Kelembagaan

Pembentukan kelembagaan yang kuat dalam upaya penanggulangan bencana ada yang bersifat formal dan non-formal. Dalam hal ini, lembaga yang bersifat formal adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga ini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai tugas dan fungsi “koordinasi, komando dan pelaksana. Untuk lembaga yang bersifat non-formal adalah platform atau forum PB/PRB seperti PLANAS PRB untuk tingkat nasional dan berbagai macam forum sejenis lainnya yang ada di daerah.



Gambar 1. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana

Pembahasan

Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Penanggulangan bencana memiliki 3 tahapan, yaitu: Pencegahan – Tanggap darurat dan Pemulihan. Namun, fenomena penanganan bencana di Indonesia masih terfokus pada tahap tanggap darurat dimana itu dilaksanakan saat terjadinya bencana atau sesaat setelah bencana terjadi. Padahal walaupun tidak sedang tanggap darurat, perlu upaya-upaya permanen untuk tindakan pencegahan. Demikian halnya dengan penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor, perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Jenis

Menurut jenis bencananya, terdapat 3 hal penanganan bencana, yaitu:

a. Pra-bencana

Bencana banjir dan tanah longsor sering terjadi di kabupaten Jember sebagai konsekuensi atas letak geografis dimana wilayah Jember bagian utara merupakan daerah pegunungan Argopuro. Dengan semakin seringnya penggundulan hutan maka besar kemungkinan terjadinya tanah longsor dan banjir bandang. Di samping itu, adanya cekungan-

cekungan atau sumbatan-sumbatan di titik tertentu di beberapa kecamatan yang berpotensi sebagai penyebab banjir. Oleh karena itu, Pemerintah dan masyarakat yang memiliki potensi sumber daya mampu melakukan pemetaan daerah rawan bencana guna mempermudah perolehan data informasi. Juga pencegahan bencana lainnya adalah dengan memperkuat bangunan atau tempat yang berpotensi penyebab banjir dan tanah longsor, seperti pembangunan tanggul sungai dari beton, pembangunan tanggul di daerah rawan longsor. Upaya edukasi kepada masyarakat rawan bencana dengan sosialisasi menjelang musim hujan dan mendirikan kampung siaga bencana atau desa siaga aktif merupakan bentuk kegiatan pra bencana.

b. Saat bencana

Ada 2 kegiatan penanganan saat terjadi bencana, yaitu tanggap darurat dan bantuan darurat. Kegiatan tanggap darurat dimulai dengan sumberdaya yang ada dan terdekat sesegera mungkin melakukan *assesment* (penilaian). *Assesment* dapat dilakukan anggota siaga bencana (perorangan, anggota TNI/Polri) dengan mendata peta lokasi yang terkena bencana, tingkat kerusakan, jumlah korban dan

perkiraan dampak yang terjadi. Selanjutnya dilakukan pelaporan sesegera mungkin sekaligus menyampaikan kebutuhan mendesak yang harus dilakukan. Sumberdaya yang ada segera diberdayakan untuk melakukan upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, orang lanjut usia. Kemudian ketika sumberdaya sudah mulai berdatangan dilakukan upaya pendirian posko penanggulangan bencana. Keberadaan posko berfungsi untuk pusat koordinasi dan komunikasi antar pihak. Semua unsur yang terlibat harus dibawah kendali posko. Posko dipimpin oleh Basarnas dan BPBD dengan anggota dari berbagai unsur lembaga/instansi seperti Dinas Sosial dan pihak-pihak yang terkait dengan kebencanaan. Keberadaan posko induk sebagai upaya koordinatif dan solutif saat terjadi bencana dan menjadi penghubung dengan pihak dalam (Pemerintah) dan pihak luar (yang akan memberi bantuan) serta masyarakat terdampak maupun tidak terdampak di sekitar daerah bencana. Dari posko inilah dapat ditentukan status keadaan darurat bencana. Perlunya pembagian sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti dapur umum, tim evakuasi dan tim logistik untuk mendata distribusi ke masyarakat yang menjadi korban bencana banjir/tanah longsor dan menampung berbagai bantuan dari pihak luar.

c. Pasca

Jenis penanganan pasca bencana adalah pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Bencana banjir pasti menyisakan berbagai kerusakan pada rumah dan pekarangan penduduk. Apalagi bencana longsor seringkali menghilangkan tempat tinggal karena tertimbun lumpur dan tanah. Bentuk

penanganannya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan program sanitasinya dan Dinas Sosial yang memiliki sumberdaya seperti Tagana, PMI, Pelopor perdamaian dan PKH. Juga program TNI masuk desa dapat menjadi pilihan dengan melakukan pembersihan lokasi bekas tanah longsor. Untuk kegiatan rekonstruksi, Pemerintah dapat melakukannya dengan pembangunan hunian sementara) dan pemberian bantuan/subsidi bagi rumah yang roboh akibat longsor. Untuk bencana banjir dalam skala sedang dan cenderung rutin, bentuk penanganan pasca bencana adalah dengan pendirian kampung siaga bencana. Seperti di Panti, sudah ada Kampung Siaga Bencana (KSB) yang diinisiasi oleh Tagana dibawah kendali Dinas Sosial kabupaten Jember dan Dinas Sosial provinsi Jawa Timur. Tujuan dibentuknya KSB adalah untukantisipasi sekaligus kesiapan warga setempat yang kampungnya atau daerahnya masuk dalam daerah rawan bencana untuk siap sedia ketika terjadi bencana banjir bandang ataupun tanah longsor.

2. Skala

Menurut bentuk level bencana, penanganan bencana dapat dibedakan menjadi 3 skala, yaitu:

a. Nasional

Bencana tanah longsor dan banjir bandang Panti di kabupaten Jember tahun 2006 masuk dalam skala bencana nasional karena dampaknya sangat besar dengan korban jiwa yang sangat banyak dan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Oleh karena itu, Tim Penanggulangan Bencana Nasional yang turun ke lapangan dengan

dibantu oleh sumberdaya yang ada di kabupaten Jember.

b. Daerah

Bencana banjir Kencong pada Desember 2018 sekarang ini masuk dalam skala bencana daerah karena jebolnya tanggul sungai menyebabkan kerusakan yang cukup parah dengan tergenangnya ribuan rumah warga dan lahan pertanian berhektar-hektar.

c. Lokal

Bencana banjir lokal di kabupaten Jember yang sering terjadi adalah di desa Wonoasri kecamatan Tempurejo akibat dataran yang cukup rendah dan intensitas hujan yang cukup tinggi. Hampir setiap tahun terjadi bencana banjir di daerah tersebut. Juga tanah longsor di desa Glagahwero kecamatan Sumberbaru awal Desember 2018 termasuk kategori lokal, karena tidak sampai berdampak besar dan penanganan bencananya hanya beberapa hari saja.

Berkaca pada siklus penanggulangan bencana maka perlu dimatangkan dan dikonsepsi manajemen risiko bencana, dalam hal ini bencana tanah longsor dan banjir.

Manajemen Risiko pada Bencana Tanah Longsor dan Banjir

Manajemen risiko bencana adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan fase-fase, antara lain:

a. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana tanah longsor dan banjir. Kegiatan

yang dapat dilakukan antara lain: penghijauan pada daerah rawan bencana seperti di lereng pegunungan Argopuro; pembenahan saluran irigasi dan selokan, sungai dan saluran pembuangan air pada titik-titik rawan banjir.

b. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

c. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: sosialisasi bahaya banjir dan tanah longsor di sekolah-sekolah dan warga masyarakat terutama pada daerah rawan bencana tanah longsor dan banjir. Juga dilaksanakan simulasi bencana banjir bandang dan tanah longsor agar ketika bencana datang, masyarakat mengetahui bagaimana langkah-langkah evakuasi korban bencana dan cara menyelamatkan diri.

d. Sosialisasi kelembagaan kebencanaan daerah. Kegiatan sosialisasi adanya wadah kebencanaan di kabupaten Jember perlu untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten hingga ke tingkat desa. Program sosialisasi dapat dilakukan

kelompok-kelompok lain yang sudah terdidik dan terlatih dalam penanganan bencana sehingga semakin melengkapi dan memperkuat Pemerintah Daerah. Kegiatan ini sangat penting untuk menginformasikan jika suatu ketika ada bencana, mereka sudah paham siapa yang perlu dihubungi secara cepat dan bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendirikan posko bencana.

Manajemen Kedaruratan

Manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Pada titik ini peran tim penanggulangan bencana sangat dituntut dalam respon cepat tanggap darurat. Semisal Tagana memiliki kewajiban dalam respon cepatnya yaitu anggota tagana harus

sudah berada di lokasi bencana maksimal 1 jam setelah terjadi bencana. Juga anggota TNI (Babinsa) maupun Polri (Babinsakamtibmas) segera tanggap melaporkan bencana yang terjadi di wilayah desanya kepada pimpinan dan pemerintahan terdekat secara cepat.

Adapun pada saat terjadi bencana bentuk fasenya yaitu tanggap darurat bencana. Tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana banjir dan tanah longsor untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Contoh pengelolaan sumber daya manusia saat tanggap darurat dapat diilustrasikan seperti gambar berikut dibawah ini:



Gambar 2. Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru
(Sumber: koleksi pribadi penulis)

Tanpa mengurangi peran sentral TNI yang selalu responsif, penanganan bencana seperti bencana tanah longsor

yang terjadi di Sumberbaru tahun 2017 yang lalu (merujuk gambar diatas) secara kelembagaan kurang tepat

mengingat di Kabupaten Jember sudah ada Lembaga/Badan yang menangani bencana dan sudah terbentuk, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember. Seharusnya struktur komando tetap ada pada BPBD Jember atau Basarnas Kabupaten Jember yang dibawah kendali langsung Bupati Jember. Respon pihak yang berkompeten dengan bencana yang kurang dapat berdampak pada lambannya penanganan bencana. Peran kelembagaan dalam mengelola dan menangani bencana amat diperlukan agar penanganan bencana dapat berjalan secara rapi dan sistematis serta terkendali. Sehingga ketika terdapat pihak-pihak yang ikut andil menangani mampu dikendalikan dan didistribusikan sesuai dengan kompetensi, peran dan kebutuhan di daerah bencana. Contohnya seperti Taruna Siaga Bencana yang sudah berpengalaman dalam Posko Dapur Umum (DU), peran Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang anggotanya banyak tersebar hampir di seluruh desa di Kabupaten Jember. RAPI memiliki peran vital dalam hal komunikasi kebencanaan terutama ketika jaringan seluler mengalami kendala konektivitas di suatu daerah tertentu. Juga Tim Trailer dan Komunitas Jeep Offroad di Jember yang memiliki potensi jangkauan mobilisasi hingga daerah-daerah terpencil, terluar dan terdepan. Pengelolaan semua potensi sumber daya seperti tersebut di atas sangat diperlukan untuk semakin memperlancar dan mempercepat proses penanganan bencana. Oleh karena itu, diperlukan sistem penanganan bencana yang handal di kabupaten Jember yang sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Keberadaan instansi terkait dengan kebencanaan seyogyanya diberdayakan dan

difungsikan semaksimal mungkin termasuk kapasitas sumber daya manusianya.

Manajemen Pemulihan

Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya yaitu :

- a. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- b. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Program – Program Penanggulangan Bencana di Daerah

Dalam kegiatan manajemen penanggulangan bencana, berbagai implementasi kegiatan dapat dilakukan di setiap fase penanggulangan bencana

sebagai upaya meminimalisasi dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana. Sebagian besar kegiatan akan terdapat pada fase pencegahan dan mitigasi seiring dengan pergeseran paradigma kebijakan manajemen bencana dari yang cenderung bersifat tanggap darurat menjadi pengelolaan yang fokus kepada pencegahan dan mitigasi. Intervensi yang dilakukan dapat mencakup kegiatan di berbagai tingkatan baik di tingkat pemerintahan, masyarakat maupun komunitas sekolah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, upaya pengurangan risiko bencana antara lain adalah:

1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.
2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.
3. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana.
4. Penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana. Membuat program-program penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan melakukan pengintegrasian penanggulangan bencana melalui sistem yang telah ada, diantaranya:

1. Kebijakan dan Perencanaan Pemerintah

Pengintegrasian yang dapat dilakukan di dalam hal kebijakan dan perencanaan pemerintah adalah pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam rencana pembangunan, dan penyusunan kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan yang diatur perlu mencakup seluruh tahapan manajemen bencana mulai dari pencegahan sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengarusutamaan PRB ke dalam kebijakan pembangunan pemerintah sebagai salah satu visi, misi, dan prioritas di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang merupakan proses per 32 anggaran yang memadai dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan upaya PRB yang berkelanjutan. Seperti yang diamanahkan oleh UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa pemerintah pusat maupun daerah perlu mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja secara memadai. Unsur-unsur kebijakan perlu ditetapkan pada wilayahnya sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Di beberapa daerah, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh, pemerintah telah menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah PRB untuk membantu memastikan penerapan upaya PRB yang terpadu dan terencana. Kebijakan yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga perlu dilakukan dan diperjelas khususnya secara operasional di tingkat daerah. Mencakup pembagian peran, mekanisme koordinasi horizontal dan vertikal serta mekanisme penerimaan dan pelaksanaan dukungan internasional.

2. Penguatan Sistem

Peringatan Dini Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24 Tahun 2007). Pengembangan sistem peringatan dini merupakan perpaduan pengembangan kebijakan, sistem dan pembagian peran antara instansi terkait untuk memastikan informasi peringatan bencana dapat disampaikan kepada

masyarakat secara tepat dan akurat. Indonesia telah memiliki sistem peringatan dini nasional yang komprehensif dalam peringatan dini gempa dan tsunami yang dikenal dengan *end to end INA Tsunami Early Warning System* (INA-TEWS). Namun sistem penyampaian pesan sampai ke tingkat masyarakat perlu untuk terus ditingkatkan dan di pertahankan mengingat luasnya wilayah dan cakupan masyarakat yang perlu dicapai oleh informasi tersebut. Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah juga adanya bencana-bencana lainnya seperti banjir, kebakaran hutan, badai dan lain-lain yang sistem peringatan dininya masih perlu dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat yang sangat beragam. Pengembangan sistem informasi peringatan dini berbasis masyarakat dan kearifan lokal juga merupakan sebuah intervensi yang dapat dilakukan di dalam peningkatan kemampuan kesiapsiagaan dan mitigasi.

3. Sistem Pendidikan

Penerapan pengetahuan dan sikap kedalam sistem pendidikan (sekolah) merupakan salah satu sumber dan penyebar informasi yang efektif kepada masyarakat. Siswa juga diharapkan dapat meneruskan pesan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya. Integrasi PRB ke dalam kurikulum formal maupun informal telah dilakukan di berbagai tingkatan. Intervensi kegiatan yang lainnya yang perlu dilakukan secara berkelanjutan adalah peningkatan kesiapsiagaan warga sekolah (Sekolah Siaga Bencana – SSB) dengan pelaksanaan peningkatan kesadaran dan kapasitas guru dan murid dalam menganalisis risiko dan melakukan pengorganisasian keadaan tanggap darurat termasuk mekanisme transisi tanggung jawab dari pihak sekolah kepada orang tua

terhadap siswa di masa bencana/pasca bencana.

4. Kearifan Lokal

Sistem budaya dan kearifan lokal yang ada perlu diberdayakan dan dibangun untuk membentuk sikap masyarakat yang terbiasa dengan kesiapsiagaan bencana sehingga dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh kearifan lokal “Smong” di Pulau Simelue telah diterapkan turun temurun antar generasi sehingga kesiapsiagaan terhadap tsunami telah menjadi suatu kebiasaan yang alami dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk dapat secara alami dan berkelanjutan membentuk sikap kesiapsiagaan di tingkat masyarakat dan lebih lentur dalam menghadapi bencana. Tantangan yang dihadapi dengan tergerusnya nilai-nilai tersebut memerlukan intervensi dalam melakukan revitalisasi kearifan dan budaya yang dapat meningkatkan hubungan antara manusia dengan alam dan memperkuat ketahanan terhadap risiko bencana.

5. Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas/Masyarakat (PRBBK)

Masyarakat adalah pihak yang terpapar oleh bencana pertama kalinya. Karena itu, peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat mutlak diperlukan agar risiko dapat dikurangi khususnya sebelum bantuan dari pihak luar mencapai lokasi bencana, mengingat lokasi Indonesia yang sangat luas. Intervensi yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan program pengurangan risiko berbasis masyarakat yang dilakukan di tingkatan terkecil yaitu tingkat desa. Pendampingan baik oleh pemerintah

maupun organisasi terkait lainnya sangat penting khususnya di tahap awal untuk memastikan proses peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dilakukan dengan kualitas yang baik dan selaras dengan kebijakan pemerintah setempat. Kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilakukan oleh organisasi sosial kemasyarakatan seperti Tagana, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Karang Taruna, PMI atau lembaga swadaya masyarakat. Beberapa tahapan pendampingan yang dapat dilakukan di tingkat masyarakat antara lain adalah pembentukan kader siaga bencana desa, pelatihan manajemen bencana dan pertolongan pertama, analisa bahaya, kerentanan dan risiko bencana, penyusunan rencana kontinjensi dan pengurangan risiko bencana desa, penyuluhan bencana, simulasi bencana, dan mitigasi. Proses kegiatan tersebut tentunya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan intervensi dari pihak luar yang semakin kecil seiring berjalannya proses. Aspek keberlanjutan dan partisipasi merupakan komponen utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penanganan bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Jember harus dilakukan secara rapi, terstruktur dan sistematis. Hal ini sangat penting mengingat potensi sumber daya manusia yang perhatian terhadap kebencanaan sangat besar. Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Basarnas dan BPBD Jember sangat diperlukan untuk mengelola sumber daya yang potensial dan lumayan lengkap (Tagana, PMI, RAPI, Karang Taruna, komunitas

tanggap bencana dan lain-lain) untuk kebutuhan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Jember dan sekitarnya.

Pengelolaan sumberdaya dapat dilaksanakan dengan pendirian posko induk bencana yang terdiri dari berbagai potensi sumberdaya yang saling melengkapi dan menguatkan dalam penanganan bencana tanah longsor dan banjir yang sering terjadi di kabupaten Jember. Keberadaan posko induk sebagai upaya koordinatif dan solutif saat terjadi bencana dan menjadi penghubung dengan pihak dalam (Pemerintah) dan pihak luar (yang akan memberi bantuan) serta masyarakat terdampak maupun tidak terdampak di sekitar daerah bencana.

Daftar Pustaka

- Amhar, Fahmi dan Darmawan, Mulyanto. 2007. *A Study on Multihazard Maps*, Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia. Jakarta: Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
- Depkes, 2001. *Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Lapangan*. Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Jakarta.
- Husein Umar. 2003. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Pustaka Utama.
- . 2007. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- World Confederation for Physical Therapy. 2016. *WCPT report: The role of physical therapists in disaster management*. London, UK.

Media Online

Agiesta, F.S. 2018. Daerah-daerah rawan gempa di Indonesia, Perlu Waspada. Available at: <https://www.merdeka.com/peristiwa/daerah-daerah-rawan-gempa-di-indonesia-perlu-waspada.html> [Accessed 14 November 2018]

Rozy, Fahrur. Belajar Manajemen Bencana Dari Jepang Available at: <https://www.scribd.com/doc/506>

[39641/Belajar-Manajemen-Bencana-Dari-Jepang#force_seo](#) [Accessed 14 November 2018]

Wijayanto, Koko. 2012. Recognize: Pencegahan dan Manajemen Bencana Available at: (<https://social-studies17.blogspot.com/2012/11/recognize-pencegahan-bencana-dan.html>) [Accessed 29 November 2018]



